

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Hardiansyah. 2022. "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Omnibus Law Cipta Kerja (Dalam Teori Dan Praktik)*". Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Harahap, Arrifudin Muda. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara. Malang
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2021. "*Catatan Kritis Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law)*". Citra Adittyta Bakti. Bandung.
- Laporan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan. 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenamedia Group. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenamedia Group. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*. CV Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Rys, Vladimir. 2011. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*. Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Uwiyono, Aloysius, dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuahan Edisi Kedua*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wijaya, Andika. 2018. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

### Jurnal Penelitian

- Afrianita, Diana dan Fitri Eriyanti. "*Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Padang*". Vol. 3 No. 1. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. 2021.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Vol. 7 Edisi I. *Jurnal Gema Keadilan*. 2020.
- Gusnia, Henni dan Ardhian Kurniawati. *Tinjauan Konstitusional Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.. Jurnal Ketenagakerjaan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Vol. 16 No. 2 Edisi Juli-Desember 2021.

- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Vol. 01 No. 01. *Jurnal Crepindo*. 2019.
- Mudiyono. *Jaminan Sosial Di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal*. Vol. 6 No. 1. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2020.
- Matindas, Christin Lady. *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Volume VI/No. 3. *Lex Privatium*. 2018.
- Mutoharoh, Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo. *Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*. Vol. 1 No. 2. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2020.
- Sinaulan, JH. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Vol. 4 No.1, feb. 2018, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67> diakses pada 28 Oktober 2023.
- Suharyoto. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. Volume 2 Issue 2. *Administrative Law and Governance Journal*. 2019.
- Zulkarnaen, Ahmad Zunaeni dan Tanti Kirana Utami. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*. Vol. 3 No. 2. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. 2016.
- Website**
- Akbar, Aulia. "Awat! Ini Akibatnya Kalau Kantor Anda Nggak Bayar BPJS TK". *CNBC Indonesia*. 26 Desember 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221226150840-72-400199/awat-ini-akibatnya-kalau-kantor-anda-nggak-bayar-bpjs-tk> diakses pada 23 Oktober 2023.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>
- Berita Pembangunan. "Bappenas : Indonesia Andalkan Industri Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi". Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 10 Juni 2022, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-indonesia-andalkan-industri-untuk-capai-pertumbuhan-ekonomi-bmPfm> diakses pada 26 Agustus 2022 pukul 20.35.
- Radlis, Muh. "BPJS Ketenagakerjaan Semarang Undang 91 Perusahaan Menunggak Iuran, Yang Datang Cuma 16". *Tribun Jateng.com*. 9 November 2018. <https://jateng.tribunnews.com/2018/11/09/bpjs-ketenagakerjaan-semarang-undang-91-perusahaan-menunggak-iuran-yang-datang-cuma-16?page=all> diakses pada 28 Oktober 2023.
- Riady, Erliana. "Utang 1.339 Badan Usaha Blitar ke BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 4,8 Miliar". *Detik Jatim*. 9 Agustus 2023. <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6866833/utang-1-339->

[badan-usaha-blitar-ke-bpjs-ketenagakerjaan-tembus-rp-4-8-miliar](#)  
diakses pada 25 Oktober 2023.

Purba, Rayendi. “Ratusan badan Usaha Masih Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan”. Suara Merauke. 11 Oktober 2023.  
<https://suara.merauke.go.id/post/4334/ratusan-badan-usaha-masih-menunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan.html> diakses pada 23 Oktober 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua